

KOLONISASI SULAWESI TENGAH: 'Kebijakan Etis' dan Ekspansi Imperialis 1890-1910

Joost Coté (penerjemah Anto Sangadji)

Diterbitkan sebagai "Colonising Central Sulawesi: The 'Ethical Policy' and Imperialist Expansion 1890-1910" Itinerario Volume 20(3) 1996: 87-110.

Pengantar

Tujuan naskah ini adalah untuk menyelidiki sifat kebijakan kolonial Belanda pada pergantian abad ke-20 di wilayah Hindia Belanda.¹ Disebut dalam historiografi periode tersebut sebagai 'kebijakan etis', biasanya digambarkan sebagai sebuah pemerintahan kesejahteraan atau pembangunan. Perbandingan-perbandingan yang lebih mutakhir telah memberi perhatian pada kesamaan-kesamaan antara kebijakan koloni abad ke-20 dan kebijakan Indonesia di masa Orde Baru dengan sebuah penekanan pada pertumbuhan ekonomi dan kurangnya 'pembangunan' individu.² 'Kebijakan etis' biasanya bukan sebuah istilah yang digunakan untuk politik kekuatan-kekuatan imperialis lain, yang mengundang pertanyaan bahwa bagaimanapun kolonialisme Belanda berbeda. Penelitian komparatif terbaru oleh M. Kuitenbrouwer, A. Stoler dan J. Breman³ mempertanyakan asumsi ini.

'Kebijakan etis' terutama dilihat sebagai sebuah kepedulian kemanusiaan terhadap subjek kolonial (seperti kebijakan kesejahteraan) atau terkait dengan modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Dalam kedua kasus tersebut perhatian ditekankan pada faktor-faktor ekonomi, yang cenderung mengabaikan karakteristik yang paling menonjol dari periode tersebut seperti penaklukan militer atas wilayah-wilayah di luar bekas pengaruh Belanda di Jawa, Sumatra, dan sebagian wilayah timur nusantara dan pembentukan sebuah negara kolonial modern sebagai konsekwensinya, dan kapitalisasi kepentingan-kepentingan ekonomi Eropa.

Dalam sebuah penjelasan terbaru tentang kebijakan kolonial awal kedua puluh, R. Cribb membandingkan 'kebijakan etis' kolonial dengan kebijakan pembangunan Indonesia kontemporer. Mengutip diskusi Elsbeth Locher-Scholten tahun 1981 tentang kebijakan

¹ Versi awal naskah ini telah dipresentasikan pada Konferensi Asosiasi Studi Asia di Brisbane, 1980.

² R. Cribb, 'Development Policy in the Early Twentieth Century' dalam: J. Dirkse et al. eds, *Indonesia's Experiences Under the New Order* (Leiden 1989).

³ M. Kuitenbrouwer, *The Netherlands and the Rise of Modern Imperialism: Colonies and Foreign Policy, 1870-1902* (New York and Oxford

1991); A. Stoler, *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979* (New Haven 1985). 'Rethinking Colonial Categories: European Communities and the Boundaries of Rule', *Comparative Studies in Society and History* 13 (1989); J. Breman, *Koelies, Planters en Koloniale Politiek* (Leiden 1987); 'Het Beest aan Banden? De Koloniale Geest aan het Begin van de Twintigste Eeuw', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 144 (1989).

kolonial,⁴ ia menyimpulkan – secara agak janggal – bahwa ‘kebijakan etis’ telah menciptakan arah kebijakan pemerintah untuk seluruh periode prakemerdekaan di abad kedua puluh. Meskipun suatu perbandingan antara dua periode sejarah Indonesia dapat diterima, kategori yang dipercekapkan tampaknya bukan ‘kesejahteraan’ melainkan ‘pembentukan negara’. Dalam kedua periode tersebut, proses ke arah pembentukan negara dikaburkan oleh sebuah wacana developmentalisme yang dimaksudkan untuk membebani semua orang di ruang publik. Dari perspektif ini, ‘etis’ pada periode sebelumnya hanya dapat berarti ‘modernisasi’. Selain itu, penggunaan istilah apa pun sebagai gambaran umum tentang kebijakan kolonial di paruh pertama abad kedua puluh seperti dikatakan Locher-Scholten, mengaburkan reorientasi signifikan baik tentang kebijakan maupun tentang wacana setelah pertengahan dekade kedua abad kedua puluh, ketika sebuah penekanan utama mengenai kebijakan adalah tentang pertahanan negara kolonial dan perusahaan kapitalis.⁵

⁴ E.B. Locher-Scholten, *Ethiek in Fragmenten: Vijf Studies over Koloniaal Denken en Doen van Nederlanders in de Indonesische Archipel, 1977-1942* (Utrecht 1981). Paradigma serupa digunakan oleh Ricklefs. M. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since 1300* (London 1993).

⁵ Sebuah buku yang lebih baru yang diedit oleh Cribb, *The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies 1880-1942* (Leiden 1994), diterbitkan setelah naskah ini ditulis, menggambarkan secara bersama keilmuan Belanda terbaru yang secara efektif mengembalikan keseimbangan pada sebuah penyelidikan tentang pembentukan negara kolonial, seperti yang dikemukakan di sini. Naskah ini meletakkan perhatian pada pembentukan struktur administrasi daerah yang sejalan dengan fokus kolonial yang lebih luas dari mayoritas bab-bab dalam buku tersebut. Secara khusus, bab oleh

Sebuah tulisan terbaru yang lebih memuaskan oleh W. Otterspeer membedakan secara lebih tegas antara kebijakan kolonial dan ideologi. Otterspeer berpendapat bahwa:

Kebijakan etis dapat disebut sebagai sebuah temuan Leiden tetapi tetap bermanfaat untuk membedakan antara kebijakan tersebut (dalam politik) dan ideologi ‘kelompok’ etis [Universitas] Leiden. Dan setelah 1910, ketika kebijakan tersebut sedang berada di bawah tekanan yang meningkat [...] yang terutama para profesor Leiden yang menganjurkannya, bertentangan dengan apa yang oleh para penentang mereka anggap sebagai kepentingan-kepentingan nasional.⁶

Naskah ini tidak bertujuan untuk menemukan basis intelektual dari ‘ideologi etis’, tetapi untuk memeriksa dua tanggapan kebijakan kontemporer terhadap perluasan wilayah pada pergantian abad ke-20 dalam wacana kolonial di masa itu. Dalam tulisan ini saya menganggap bahwa perluasan wilayah menggambarkan suatu ciri penting dari praktik dan kebijakan kolonial Belanda pada pergantian abad kedua puluh, akan tetapi geosentrisitas banyak literatur tentang ‘kebijakan etis’, diperkuat tanpa keraguan sedikitpun oleh kekaburan sumber-sumber alternatif, cenderung melanggengkan sebuah

Fasseur menunjuk pada kontradiksi akhir dari sebuah kebijakan kolonial yang mengklaim sebagai Indonesia-sentris dan secara implisit menetapkan definisi ‘etis’ sebagai ‘perwalian,’ sebuah perubahan paternalistik dan retorik yang membenarkan penindasan klaim-klaim emansipatoris pada satu sisi, dan pemeliharaan struktur kolonial di sisi lain.

⁶ W. Otterspeer, 'The Ethical Imperative' in: W. Otterspeer ed., *Leiden Oriental Connections* (Leiden 1991).

penilaian tentang kebijakan kolonial yang terkait dengan dampaknya di Jawa. Keadaan ini telah mulai berubah dalam sepuluh tahun terakhir dengan berbagai studi baru yang berasal dari para sarjana Belanda dengan akses ke arsip-arsip yang relevan, terutama yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi kolonial, imperialisme, dan pada tingkat yang lebih rendah, tentang basis intelektual pemikiran kolonial Belanda sendiri.⁷ Seperti ditunjukkan oleh sebuah publikasi terbaru, para sarjana Indonesia juga semakin bergerak melampaui batas-batas sejarah nasionalisme untuk menyelidiki struktur ekonomi dan politik Indonesia 'pra-kemerdekaan'.⁸

Sementara menurunnya kesejahteraan petani Jawa telah mengkhawatirkan dan memotivasi tindakan banyak pejabat Belanda dan tidak diragukan lagi telah menggugah hati para pemilih metropolitan. Intinya, kondisi-kondisi ekonomi di Jawa mengkonfirmasi realitas-realitas politik yang telah muncul sejak tahun 1880-an, bahwa penghisapan yang terus menerus berbasis kolonial sudah tidak memungkinkan; sumber daya-sumber daya baru serta sebuah struktur baru untuk ekonomi kolonial harus ditemukan. Sebagaimana J. Th. Lindblad dan lainnya

telah menunjukkan dengan jelas, pulau-pulau di luar Jawa, dan terutama pergeseran ke arah eksploitasi bahan-bahan mentah yang diperlukan sebuah ekonomi industri yang sedang berkembang - karet, minyak, timah - telah mendorong kebijakan.⁹ Idealisme yang biasanya digunakan untuk menilai pencapaian-pencapaian 'kebijakan etis' (rencana-rencana perbaikan pendidikan, irigasi, dan kesehatan di Jawa) diekspresikan dalam kurun waktu kebijakan yang singkat dalam dekade pertama abad ini, ketika mesin kolonial bergeser untuk mencakup sebuah realitas ekonomi baru yang perlu diselidiki lebih jauh. Di luar ruang kebijakan kolonial, sebuah liberalisme kemanusiaan idealis terus menjadi ciri sekelompok kecil akademisi dan pengamat kolonial, terutama yang disebut kaum orientalis Leiden, dengan reputasi dalam pembuatan wacana akademis dan publik telah menunjukkan bahwa perspektif mereka tetap menempati sebuah posisi paling berpengaruh.¹⁰

Dilihat dari perspektif luar Jawa bagian timur, apa yang disebut 'kebijakan etis' dapat dilihat dari sisi transformasi budaya mas-

⁷ Lihat secara khusus penelitian J.Th. Lindblad, *Between Dayak and the Dutch: The Economic History of Southeast Kalimantan, 1880-1942* (Dordrecht 1988) dan J. Th. Lindblad ed., *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia* (Leiden 1993) dan Lindblad and Clemens eds, *Het Belang van de Buitengewesten* (Amsterdam 1989).

⁸ Selain keteladanan Profesor Sartono dalam hal ini, ini ditunjukkan dalam prosiding konferensi pertama tentang sejarah ekonomi Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tahun 1991 sebagaimana tercermin dalam: J. T. Lindblad ed., *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia* (Leiden 1993).

⁹ Ibid.

¹⁰ Lihat pembahasan yang lebih luas di Otterspeer, 'Ethical Imperative.' Konflik yang tampak dalam lingkaran akademis ini antara 'asosiasiisme' Snouck Hurgronje dan 'tradisionalisme' van Vollenhoven tidak begitu besar dalam praktiknya. Keduanya menganggap pekerjaan mereka sebagai sebuah kontribusi untuk pembentukan kebijakan kolonial dan khususnya memiliki sebuah agenda anti-Islam ('adat' bagaimanapun juga memungkinkan sebuah pembedaan antara 'tradisional' dan 'pengaruh asing') dan itu merupakan upaya van Vollenhoven untuk 'merasionalisasi kebiasaan tradisional' dan dengan demikian membawa 'tradisi' ke dalam modernitas. Snouck ingin menghindari kodifikasi semacam ini karena akan menghalangi proses evolusi perubahan yang pasti akan disebabkan oleh 'asosiasi.'

varakat-masyarakat tradisional nusantara, yang oleh wacana reformis dominan dianggap sebagai tugas dan kewajiban peradaban modern – sebuah tugas yang sesuai dengan kepedulian untuk merumuskan kembali basis ekonomi kekuasaan kolonial. Dari perspektif ini, tugas ganda tersebut dapat dilihat sebagai suatu ekspresi dari sebuah kebangkitan nasionalisme Belanda yang berusaha memahami realitas-realitas warisan kolonialnya dalam konteks imperialisme Eropa. Kolonialisme dan fase khusus dalam ekspansi kolonialis tersebut menjadi jantung dalam pemulihan nasionalisme masyarakat Belanda di metropolitan Eropa seperti yang terjadi pada setiap kekuasaan kolonial lainnya.¹¹ Ekspansi imperialis Belanda¹² mengalir dari dan menjadi bagian dari restrukturisasi ekonomi kapitalisme industri di Eropa yang menimbulkan gejala-gejala sosial dan budaya secara besar-besaran. Gerakan-gerakan sosialis dan feminis internasional serta gerakan-gerakan humanitarisme liberal dan idealisme moral, yang semuanya bergema dalam historiografi Indonesia sebagai ‘kebijakan etis’, merupakan suatu jawaban terhadap perkembangan tersebut. Bentuk-bentuk reformulasi budaya dalam iklim politik dan ekonomi saat itu diterjemahkan ke dalam agenda-agenda nasionalis, dan ketika sentimen semacam itu mengguncang kebijakan dan praktik kolonial,

¹¹ Untuk sebuah pembahasan rinci tentang hubungan ini lihat Kuitenbrouwer, *Modern Imperialism*, bab 3.

¹² Seperti pendapat Kuitenbrouwer, tidak seperti kekuatan-kekuatan imperialis lainnya, ekspansi teritorial Belanda terjadi dalam batas-batas wilayah pengaruhnya yang telah ditentukan. Dalam semua hal, perilaku Belanda mirip dengan yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan imperialis yang lebih besar.

hal itu telah memicu suatu tanggapan nasionalis dari subjek yang terjajah.¹³

Potensi luar Jawa baik dalam hal eksploitasi oleh perusahaan swasta maupun secara tidak langsung sebagai sebuah basis keuangan untuk perbendaharaan kolonial, mensyaratkan sebuah tugas pendidikan yang sangat besar yang memerlukan sebuah misi nasionalis Belanda. Dalam prosesnya, “kekuatan-kekuatan dinamis diwujudkan [...] yang] sebagian merupakan produk sampingan kebijakan [dan] sebagian [...] dihasilkan dari sebab-sebab yang berada di luar tujuan-tujuan dan harapan-harapan pemerintah.”¹⁴ Untuk menyimpulkan, seperti yang telah dilakukan oleh generasi para sejarawan sebelumnya, bahwa kebijakan etis gagal mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, adalah keliru memahami retorika etisi (yaitu, mereka yang mendukung ide-ide tentang sebuah nasionalisme Eropa idealis baru) untuk praktik imperialisme baru.

Nasionalisme dan Imperialisme Belanda

Kekecewaan terhadap liberalisme *laissez-faire* dan sebuah seruan baru terhadap negara untuk berperan besar muncul di Eropa karena saling ketergantungan antara kompleks industri metropolitan dan sayap kolonialnya menjadi penting untuk mendukung pertum-

¹³ Ini tentu saja merupakan sebuah ringkasan yang sangat padat. Argumen tersebut mengarah pada sejauh mana sebuah simbolisme radikal dalam nasionalisme Belanda dan reformisme kebijakan kolonial diappropriasi oleh para modernis Indonesia awal yang berpendidikan Barat di satu sisi dan sejauh mana nasionalisme Belanda yang ditunjukkan dalam kebijakan kolonial membangkitkan reaksi-reaksi nasionalis yang lebih fundamental dari yang terjajah di sisi lain.

¹⁴ J. Legge, *Indonesia* (Sydney: 1977) 102-103.

bahan industri lebih lanjut guna melayani kapitalis-kapitalis yang sedang tumbuh dengan sebuah sumber bahan-bahan baku yang lebih besar dan lebih aman dan sebuah basis konsumen yang luas. Kepedulian ekonomi baru ini menyoroiti keuntungan terbatas dari suatu pendekatan eksploitatif secara murni terhadap kolonialisme. Mendapatkan sebuah kolektivitas kepentingan-kepentingan (sejauh di tingkat perolehan tenaga tenaga kerja cadangan 'bebas' yang patuh) menjadi unsur penting dominasi ekonomi dan politik yang sukses. Pada sebuah level politik dan budaya, langkah ini dibenarkan oleh dan sesuai dengan hak untuk mengurus masyarakat-masyarakat pribumi atas dasar kemanusiaan – sebuah klaim yang pada akhirnya didasarkan pada keyakinan tentang keunggulan budaya teknorasional barat.¹⁵ Tidak seperti rasionalisasi ekonomi, klaim tersebut dapat dan juga dimiliki oleh masyarakat umum dari pemilih metropolitan yang memiliki sebuah 'misi mulia' nasional secara bersama. Akibatnya, panji-panji kekuatan-kekuatan imperialis baru yang mengusung slogan-slogan 'beban orang kulit putih', *mission civilisatrice* atau *ethische politiek*.

Di Belanda, penolakan terhadap politik *laissez-faire* liberal memperoleh momentum politik pada tahun 1888, dengan terpilihnya pemerintahan partai Kristen sayap kanan, *Anti-Revolutionaire Partij*. Partai ini didasarkan pada sebuah kepedulian kepada 'orang kecil' dan kembali ke prinsip tradisional (Kristen) daripada prinsip-prinsip tanpa nilai (Liberal-sekuler). Dalam hal kebijakan kolonial, hal ini memerlukan dukungan negara lebih besar terhadap misionaris Kristen

¹⁵ Misalnya, ini adalah pembenaran yang diberikan oleh Snouck Hurgronje. Lihat W. Otterspeer, 'Ethical Imperative.'

sebagai sebuah ciri dari sifat masyarakat Belanda yang yang bersandar pada Kristen sebagai satu-satunya cara untuk mencapai "kemajuan spiritual dan budaya penduduk [pribumi]." Kebijakan kolonial adalah untuk mengarah pada "asosiasi" penduduk pribumi dengan budaya Euro-Kristen melalui pendidikan yang disediakan sekolah-sekolah misionaris. Dalam manifesto partai pertamanya pada tahun 1879, pemimpinnya, A. Kuyper, seorang yang memiliki sebuah kepribadian dinamis dan pengaruh intelektual dominan di Belanda pada kuartal terakhir abad kesembilan belas, menyerukan perubahan dari "dorongan mencari keuntungan politik kita untuk mengeksploitasi koloni untuk kepentingan negara atau individu" dengan "politik kewajiban moral." Peran Eropa adalah menjadi salah satu perwalian dengan tiga rangkap tanggung jawab dari setiap wali terhadap seorang anak, yaitu:

- (a) untuk membesarkannya dengan benar,
- (b) untuk mengelola harta milik untuk keuntungan terbaiknya, dan
- (c) untuk memungkinkannya di masa depan [...] mengambil posisi yang lebih independen.¹⁶

Posisi Anti-Revolutionaire Partij menjadi sebuah batu ujian moral umum terhadap politik kolonial setelah 1888 lengkap dengan kualitas-kualitas Kristen dan paternalistik yang esensial yang memberikan kehormatan baru yang telah diolok-olok Multatuli pada satu generasi sebelumnya. Sebaliknya, nasionalisme Kristiani ini benar-benar menginspirasi banyak orang. Akan tetapi, hal itu

¹⁶ Rujukan ke kebijakan A.R.P. dikutip dalam B.J. Brouwer, *De Houding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische Beweging* (Amsterdam 1958) 2.

ditentang oleh mereka, seperti C. Snouck Hurgronje, yang sepakat dengan tujuan ‘asosiasi’, tetapi memperingatkan bahaya-bahaya kebangkitan oposisi Islam. Bagi Snouck Hurgronje dan ‘orientalis-orientalis Leiden’, ciri khas peradaban Belanda adalah sains dan sebuah liberalisme rasional di wilayah ‘netral’, di mana orang-orang Eropa Kristen, Muslim, dan orang-orang Indonesia tradisional dapat memperoleh titik temu. Di luar ketegangan eksotis tentang debat halus semacam itu, aksioma administratif yang disederhanakan, ‘membudayakan penduduk pribumi’ menyediakan landasan baru untuk kelangsungan ekonomi koloni.

Pada pertengahan 1890-an, gagasan bahwa “pembentukan otoritas Belanda adalah sebuah berkah bagi Hindia” secara umum diterima oleh seluruh spektrum politik di Den Haag. Itu merupakan sebuah slogan yang, sementara menjadi sebuah tolok ukur yang berguna untuk menilai nasib petani Jawa, memiliki makna penting sebagai rujukan terhadap kawasan yang akan menjadi daerah-daerah jajahan di luar poros Jawa-Sumatera. Selain itu, semua pihak sepakat bahwa cita-cita pendidikan dasar universal penting untuk mengangkat penduduk Indonesia ke sebuah derajat yang lebih dinamis secara ekonomi agar dapat ‘maju’ secara material dan spiritual. Dalam melaksanakan cita-cita tersebut, perbedaan-perbedaan pendapat besar muncul. Kaum liberal sekuler seperti Conrad van Deventer dan Menteri Koloni Foch yang menganggap pendidikan sebagai kunci pemecahan masalah-masalah ekonomi Jawa. Di sisi lain, direktur pendidikan Abendanon dan penasihat urusan pribumi Snouck Hurgronje menekankan pada pengembangan budaya eselon-eselon lebih tinggi dari masyarakat pribumi untuk memberikan kepemimpinan spiritual progresif. Sementara

Partai Kristen menganggap pendidikan universal dan konversi ke Kristen sebagai kunci untuk perbaikan moral dan prasyarat untuk suatu perbaikan permanen dalam kesejahteraan materi. Terakhir, perspektif sosialis Henri van Kol yang menyatakan bahwa pembelajaran akademis tidak pada tempatnya “di sebuah kawasan tanpa buku.”

Sedangkan di Jawa arah-arah kebijakan baru di awal abad kedua puluh harus dilaksanakan dengan sebuah perhatian pada pembangunan irigasi dan kesehatan masyarakat dan pembentukan lembaga-lembaga kredit, di Luar Jawa arah baru kebijakan kolonial digembar-gemborkan dengan penaklukan militer dan penguasaan yang dirancang untuk memperjelas batas-batas kolonial dalam menghadapi tekanan imperialis dan untuk secara efisien dan cepat menata kembali basis ekonomi koloni. Ini adalah sebuah operasi, yang setelah penaklukan berdarah sebelumnya di Aceh dan Lombok diselesaikan dengan singkat dalam beberapa tahun, yang telah membebani kebijakan kolonial Belanda sejak 1695 – ketidakmampuan mendasar untuk membangun kendali atas nusantara. Dengan bentangan baru wilayah kolonial yang secara singkat dipegang oleh Belanda antara tahun 1912 dan 1942, pendidikan dan “asosiasi kepentingan sukarela,” kesejahteraan materi dan *rust en orde* (secara harfiah: ketenangan dan ketertiban) merupakan bahan-bahan utama yang menjadi basis penting untuk negara kolonial modern yang layak dan eksploitasi ekonomi yang berhasil. Sejarah nasionalisme Indonesia memperjelas bagaimana visi Belanda ini telah dicapai, sejauh hal itu dengan pengawasan, penindakan hukum dan administratif dan, pada akhirnya, dengan sebuah kegagalan kekuasaan militer.

Sulawesi Tengah dan Kebijakan Kolonial Baru: Dua Penafsiran

Sulawesi Tengah memberikan sebuah studi kasus instruktif tentang implementasi kebijakan kolonial baru.¹⁷ Awalnya 'ditemukan' oleh para pejabat Belanda pada tahun 1860-an, saran-saran telah dibuat ketika itu untuk aneksasi wilayah itu ditolak dalam konteks kebijakan non-ekspansionis saat itu. Wilayah itu dibawa ke dalam hubungan-hubungan formal dengan Batavia pada tahun 1888 sebagai bagian dari kesibukan kegiatan diplomatik yang sudah dirancang untuk mengamankan wilayah tersebut dari gangguan politik dan ekonomi Inggris.¹⁸ 'Plakat-plakat pendek' gaya baru digunakan dalam hubungan-hubungan diplomatik antara pemerintah kolonial Belanda di Batavia dan daerah yang secara keseluruhan dimaksud sebagai negara-negara merdeka. Plakat-plakat ini secara resmi menegaskan bahwa penguasa pribumi mengakui kedaulatan ratu Belanda. Lebih penting lagi, plakat-plakat tersebut menjamin pemerintah kolonial untuk melakukan "pembagian sewa-sewa pertambangan dan pertanian di dalam wilayah otonom, bersama dengan pembayaran uang kepada pemegang sewa."¹⁹

Pada tahun 1891, seorang pejabat lokal melaporkan bahwa "arus pengusaha" sudah berada di wilayah Teluk Tomini yang kemungkinan besar akan menimbulkan "kesulitan-kesulitan" dengan penguasa-penguasa

lokal independen, yang pada gilirannya mungkin memerlukan tindakan militer.²⁰ Menurut rumor-rumor yang beredar saat itu, wilayah pedalaman Sulawesi Tengah kaya dengan bijih besi, batu bara, dan hasil-hasil hutan, yang tetap tidak dapat diakses oleh pengusaha-pengusaha Eropa tanpa sebuah kehadiran pemerintah kolonial yang jelas. Pejabat lokal yang sama berpendapat bahwa keberadaan kolonial semacam itu dapat didanai melalui peningkatan pendapatan pemerintah yang berasal dari pemungutan pajak terhadap kegiatan ekonomi yang lebih besar. Secara signifikan, laporannya berargumen dalam kaitan dengan retorika 'etis' yang kemudian muncul, bahwa kehadiran pemerintah kolonial akan menghasilkan "keadaan yang sama sekali berbeda [...] di mana usaha pertanian dan eksploitasi mineral akan dimungkinkan," yang pada gilirannya akan "mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat".²¹ Asumsi-asumsi tentang kandungan-kandungan mineral yang kaya serta populasi-populasi yang besar (yang kemudian terbukti tidak benar) terus menginspirasi kepentingan di kawasan tersebut sementara pada dasarnya daerah itu tetap merupakan suatu kawasan yang belum dipetakan dan, ironisnya, cukup lama bagi keyakinan-keyakinan semacam itu menentukan kebijakan kolonial di kawasan tersebut.

¹⁷ Sebuah pembahasan rinci tentang kebijakan kolonial di Sulawesi Tengah antara tahun 1895 dan 1925 dapat ditemukan di J. Coté, *The Colonisation and Schooling of the To Pamona of Central Sulawesi, 1895-1925* (Unpublished Master's thesis, Monash 1980).

¹⁸ Ini termasuk kehadiran pihak Australia yang mencari emas.

¹⁹ Koloniaal Verslag [Laporan Kolonial], 1894-1895 (Batavia) 27.

²⁰ Asisten residen Gorontalo untuk penduduk Menado, *Toelichting van het Al of Niet Wenschelijke van het Verlenen van Mijnc concessies in de Tomini Bocht, 22 Maret 1891* [Catatan-catatan tentang keinginan atau sebaliknya memberikan izin-izin pertambangan di Teluk Tomini], Kruyt Archive, Hendrik Kramer Instituut, Oegstgeest, Netherlands. Semua referensi lebih lanjut untuk materi yang tidak diterbitkan berkaitan dengan arsip ini dan salinan materi dimiliki oleh penulis.

²¹ Ibid.

Sementara pada tahun sembilan puluhan pemerintah kolonial terlalu terlibat dalam mempertahankan prestise dalam perang melawan negara-negara Aceh dan Bali, titik awal untuk membangun sebuah kehadiran kolonial dengan penunjukan pada tahun 1894 seorang *controleur* (pejabat distrik) pertama di Poso, sebuah pos perdagangan di pesisir. Poso akan menjadi lokasi kantor bea cukai untuk mengenakan pajak terhadap volume perdagangan yang terus meningkat antara penduduk lokal dan pedagang Tionghoa. Pada saat yang sama, pemerintah mendorong dan mendukung penempatan misionaris di daerah tersebut untuk melakukan “pekerjaan pengadaban” di mana “penduduk-penduduk pribumi” (Alfurs dan kemudian Toraja), yang memiliki reputasi sebagai pemburu-pemburu kepala yang ganas, akan “secara bertahap menerima kehadiran Eropa” dan pada saat yang sama, menciptakan sebuah penghalang bagi pengaruh Islam yang sedang tumbuh di daerah tersebut.²²

Pada tahun 1902, pos Poso ditingkatkan menjadi asisten residen. Penunjukan administrator pertama kali adalah A.J.M. Engelenberg, seorang telah terlibat dalam “pengamanan Lombok [di mana] semua proposalnya [...] telah diterima oleh pemerintah.”²³ Penunjukan administrator berpengalaman seperti itu mencerminkan pandangan resmi tentang pentingnya wilayah Luar Jawa dalam rezim kolonial baru. Bukti yang tidak langsung menunjukkan bahwa misionaris

menggunakan hubungan-hubungan dekatnya dengan birokrasi kolonial untuk mendapatkan penunjukan yang “kuat” di wilayah operasi-operasinya yang baru, dan dalam sebuah iklim kekhawatiran yang sedang tumbuh tentang perluasan “fanatisme Islam,” dengan mudah diterima.²⁴

Engelenberg terkesan dengan pengaruh misionaris yang dapat diterapkan di wilayah tersebut, yang menurutnya merupakan prasyarat penting untuk pencapaian kemajuan materi yang diinginkan penduduk pribumi. Ia menerima jaminan-jaminan misionaris bahwa landasan agama masyarakat Pamona mengganggu pencapaian tujuan tersebut dan bahwa ciri-ciri penghambat budaya tradisional hanya dapat dihilangkan jika pengaruh-pengaruh supranatural yang mengikat orang Pamona pada datu (penguasa) Luwu’ (dahulu sebuah negara Islam yang kuat di Sulawesi Selatan) dapat dipatahkan dan misionaris diberi kebebasan penuh untuk bertindak.

Tanpa dukungan militer untuk kebijakan semacam itu ketika pasukan Belanda masih terlibat dalam penaklukan Aceh, Jambi dan Kalimantan, dan sementara semua kapal perang yang ada terlibat dalam pertahanan netralitas koloni selama perang Rusia-Jepang, Engelenberg dengan dukungan misionaris, mengupayakan sebuah misi diplomatik untuk meyakinkan datu Luwu’ untuk melepaskan kendali formal atas suku Pamona. Rencananya Engelenberg untuk wilayah tersebut

²² Pandangan ini dikomunikasikan kepada Lembaga Misionaris Belanda oleh korespondennya yang berbasis di Menado, Rev. Wieland dalam sebuah surat kepada NMS tertanggal 15 November 1888, Arsip Kruyt.

²³ Catatan editor untuk sebuah artikel oleh A.J.M. Engelenberg, ‘Ons Bestuursbeleid in Nederlandsch Indie’ [Kebijakan Pemerintah Kami di Hindia Belanda], *Het Vaderland* (5 August 1904).

²⁴ Hal ini disarankan oleh korespondensi misionaris Albert Kruyt pada saat itu dan dalam dokumen resmi yang tidak diterbitkan oleh pejabat administrasi luar Jawa, H. Colijn pada tahun 1906. Kruyt sangat dikenal oleh Snouck Hurgronje yang sementara menentang evangelisasi di daerah-daerah Islam, melihat konversi tersebut di ‘zona-zona netral’ yang lihai secara politik. Engelenberg dikenal Snouck Hurgronje sejak mereka bekerja sama di Jawa Barat dalam mengelola pendidikan Achmad Djajdiningrat.

termasuk pembangunan jalan skala besar, pembentukan korps personel administrasi lokal dan dorongan industri-industri lokal sebagai dasar untuk merangsang ekonomi pribumi. Semua rencana tersebut demi membuat daerah itu menjadi bagian dari kolonialisme baru.²⁵ Kunci keberhasilan rencananya adalah keberadaan sejumlah besar 'rasul-rasul peradaban,'²⁶ yang karyanya menurut dia tidak hanya akan bermanfaat bagi kemajuan rakyat itu sendiri tetapi juga bagi koloni secara keseluruhan:

Keuntungan politik yang diperoleh negara jika seluruh Sulawesi Tengah dapat ditambahkan menjadi wilayah-wilayah nusantara pro-pemerintah karena keyakinan agamanya tidak dapat dibesar-besarkan.²⁷

Untuk membiayai investasi modal awal yang dibutuhkan, daerah harus dikendalikan langsung oleh pemerintah sehingga sebagian dari 'hutang kehormatan' dapat disalurkan ke daerah. Dia memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan 100.000 gulden untuk membiayai visinya.

Di Batavia di mana dia berusaha untuk berdebat untuk mendukung rencananya, Snouck Hurgronje meyakinkannya tentang dukungan dari pemerintah, tetapi rencana tersebut kekurangan sarana untuk melaksanakannya:

Dari seluruh pelosok nusantara permintaan diterima dengan volume yang terus meningkat dan beberapa sudah berulang tanpa henti yang di mana yang satu tampak lebih mendesak daripada yang lain [...] dan pendapatan-pendapatan yang diterima harus dibayarkan menjadi lebih sedikit.²⁸

Usulan-usulan untuk membelanjakan 'hutang kehormatan' van Deventer jelas tidak terbatas. Engelenberg dan rencana-rencananya untuk wilayah Poso dengan utuh merangkul kekuatan inspirasi dari filosofi kolonial baru. Pada tahun yang sama, Menteri Koloni menyarankan agar menghabiskan seratus juta gulden untuk segera memperluas pendidikan pribumi. Tampaknya tidak dapat disangkal bahwa seruan untuk kebijakan kolonial yang lebih 'etis' menginspirasi banyak pejabat kolonial dan pemerintah di masa transisi ini, tetapi usulan-usulan yang diilhami dengan demikian tidak sesuai dengan realitas situasi keuangan. Pada akhirnya, mereka tidak cocok dengan realitas-realitas visi para arsitek kolonial yang berpikiran lebih sadar mengawasi transformasi penguasaan kolonial.

Merasa putus asa dengan pengalamannya di Batavia, Engelenberg pergi ke Den Haag di mana dia mempresentasikan sebuah rencana yang dimodifikasi, yang diterbitkan di surat kabar harian sebagai sebuah cetak biru untuk kebijakan kolonial baru.²⁹ Rencana baru tersebut – dipengaruhi oleh diskusi-diskusinya dengan misionaris Poso dan sosialis Kristen, Albert Kruyt – dapat dikatakan melambangkan posisi 'etis.' 'Tujuan kami,' katanya, 'adalah memberi penduduk pribumi kesempatan untuk

²⁵ Engelenberg melihat misinya sebagai 'untuk membawa kepada orang-orang untuk sebuah masa kemakmuran, permukiman-pemukiman yang kaya dan kekuatan fisik.' Engelenberg kepada Kruyt, 20 Juni 1903, Arsip Kruyt.

²⁶ Engelenberg kepada Residen Manado, 27 September 1903, Arsip Kruyt, Confidential no. 720/6.

²⁷ Ibid.

²⁸ Snouck Hurgronje ke Kruyt, 1 Mei 1903, Arsip Kruyt.

²⁹ Engelenberg, '*Ons Bestuursbeleid in Nederlandsche Indie*'.

[mencapai] sebuah standar hidup yang tinggi.’ Kebijakan kolonial di masa lalu telah membuat orang Jawa tetap dalam sebuah keadaan tidak berkembang yang ‘membuatnya tidak cocok dengan sebuah ketekunan tinggi dalam perjuangan sulit yang selalu menjadi beban kehidupan.’ Hanya ketika setiap bagian negeri, baik negara maupun wilayah, menginginkan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri dan diizinkan untuk membuat keputusan-keputusannya sendiri dalam soal ini, seseorang dapat mengharapkan kemakmuran bago keseluruhan.³⁰

Cetak biru Engelenberg untuk wilayah tersebut sekarang merupakan usulan mengenai federasi negara-negara mandiri yang memiliki pemerintahan sendiri yang didukung dana-dana hibah pemerintah kolonial di mana usaha ekonomi akan mengeksploitasi potensi mineral, pertanian, dan komersial di wilayah tersebut. Pendidikan akan menjadi ciri utama dalam melatih penduduk untuk berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Melalui pelatihan untuk kemandirian ekonomi dan politik, Engelenberg percaya bahwa penduduk pribumi akan dibawa lebih dekat ke tahap pembangunan yang telah dicapai Belanda.

Hal ini mungkin mewakili sebuah tingkat tertinggi dalam rumusan kebijakan kolonial ‘etis’ yang idealis dengan memasukkan semua elemen utama: pendidikan, pembayaran ‘hutang kehormatan’ oleh Belanda, kemakmuran ekonomi dan sedikit otonomi. Engelenberg berhasil memahami masalah tersebut tetapi gagal memberikan sebuah solusi yang realistis. Namun, para pemimpin politik yang menganjurkan program ‘etis,’ seperti kaum liberal progresif C.Th. van Deventer dan E.B. Kielstra (keduanya bekerja mengembangkan cetak biru ekonomi untuk penyelamatan

Jawa), menganggap rencana-rencana tersebut, ‘terlalu maju’:

mengingat kondisi-kondisi Teluk Tomini saat ini, diperlukan waktu bertahun-tahun sebelum wilayah itu dapat dianggap mendukung di mana para penguasa pribumi di sana dapat diberikan lebih banyak kebebasan; para penguasa ini masih terlalu tidak berpendidikan dan terlebih lagi nyaris tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk memajukan kepentingan rakyatnya sementara rakyatnya sendiri masih berada pada tingkat peradaban yang terlalu rendah [...] Memang Engelenberg terlalu optimis dan memandang keadaan di negara-negara Teluk Tomini yang memiliki populasi primitif melalui cara pandang yang optimistik.³¹

Namun unsur-unsur yang membentuk usulan Engelenberg diambil dari wacana kolonial progresif yang sedang dipopulerkan. ‘Desentralisasi,’ ‘pribumisasi’ dan ‘pendidikan (kembali)’ merupakan simbol-simbol dari wacana tersebut dan merupakan sebuah pembalikan posisi tepat terhadap argumen-argumen yang telah digunakan untuk membenarkan kebijakan kolonial abad kesembilan belas *onthoudingspolitiek* (kebijakan non-keterlibatan di luar wilayah kontrol dan pengaruh langsung). Negara sekarang dipandang memiliki tang-

³¹ Engelenberg pergi menemui para ‘ahli’ ini secara pribadi setibanya di Belanda. Pandangan-pandangan Van Deventer dilaporkan dalam *De Indische Gids* dalam laporan pidatonya kepada *Indische Genootschap* pada tahun 1904. Editor jurnal tersebut berbagi pandangan-pandangan dengan Van Deventer. Dalam sebuah artikel paralel, ‘De Tomini Bocht’, penduduk Menado, atasan Engelenberg menyuarakan skeptisisme yang sama, *De Indische Gids* (1904) 1666.

³⁰ Ibid.

gung jawab utama untuk menciptakan kondisi-kondisi pembangunan ekonomi dan kemajuan material secara umum, dan daripada membatasi diri dalam memusatkan sumber daya yang terbatas di beberapa wilayah, negara harus memobilisasi penduduk untuk mengidentifikasi dengan kebijakan-kebijakannya (kemanusiaan, *'welfarist'*) untuk menyediakan sebuah pembangunan berbasis luas. Cohen-Stuart, anggota badan Batavia, dengan cerdas menulis ulang tema-tema lama di dalam rumusan baru. Untuk mendukung kebijakan ekspansionis baru dan penekanan baru pada kesejahteraan rakyat, dia menganggap perlunya pendidikan pribumi yang diperluas untuk menyediakan personel yang dibutuhkan untuk mengatur sebuah wilayah koloni yang telah diperluas.³² Perluasan pendidikan di masyarakat pribumi secara lebih umum, menurutnya, tidak hanya membuat tugas para administrator pribumi lebih mudah, tetapi juga akan membantu 'merekatkan rakyat dengan kita', dengan syarat warga-warga desa mendirikan sekolah-sekolah mereka sendiri, yang dipandang sebagai sebuah langkah maju untuk tanggung jawab sendiri dan 'desentralisasi.'

'Desentralisasi' dalam rumusan Cohen-Stuart adalah sebuah istilah keliru dalam kaitannya dengan otonomi politik. Beberapa pemberian wewenang kepada kekuasaan lokal dipertimbangkan oleh kebijakan baru. Ini akan mencakup beberapa peralihan kekuasaan dari Belanda ke Batavia dan, secara simbolis, ke dewan regional baru yang didominasi oleh pemilih Eropa. Kedua inisiatif tersebut merupakan sebuah tanggapan terhadap tuntutan kolonial Eropa untuk perwakilan yang lebih memadai. Baru kemudian, pada tahun

1918, *Volksraad* (dewan penasihat Gubernur Jenderal) didirikan dengan prinsip-prinsip yang sangat ketat untuk mewakili substansi retorika pada periode ini. Bagi Cohen-Stuart, 'desentralisasi' bukan suatu perubahan kebijakan menuju sebuah pengakuan otonomi pribumi, melainkan penyempurnaan praktik abad kesembilan belas yang membiarkan negara-negara pribumi mengatur diri mereka sendiri. Bedanya, sekarang pemerintah kolonial akan menjalankan tanggung jawab moralnya dengan lebih ketat mengawasi dan menentukan prinsip-prinsip pemerintahan daerah. 'Pribumisasi' pegawai negeri sangat penting, kata Cohen-Stuart, untuk membiayai perluasan pemerintahan karena pejabat pribumi 'akan dibayar dengan tarif yang lebih rendah mengikuti standar hidup rakyat jajahan yang lebih rendah.' Ekspansi kolonial memerlukan pribumisasi sehingga personel Eropa dapat tersebar lebih terbatas di wilayah yang lebih luas. Dengan cara ini, 'kita dapat membatasi diri kita sebanyak mungkin pada peran pengawas dan menyerahkan tugas pemerintahan sedapat mungkin kepada penduduk pribumi sendiri.' Pribumisasi dalam konteks ini merupakan cermin pembagian kerja administratif yang lebih halus dan membuat administrasi kerajaan kolonial yang diperluas menjadi layak.

Perluasan pendidikan pribumi, dalam praktiknya, tidak mencakup visi yang lebih idealis yang dimiliki beberapa *ethici*. Di sini pilihannya adalah antara dua konsep terbatas, perluasan secara terbatas pendidikan tingkat tinggi bagi elit pribumi dengan pemberian akses ke budaya Eropa (posisi yang dianjurkan direktur pendidikan, Abendanon dan oleh Snouck Hurgronje misalnya) dan penyediaan pendidikan dasar universal Barat yang disarankan Cohen-Stuart dan seperti yang dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal, Jenderal

³² J.W.T. Cohen-Stuart, 'Oprichting van Inlandsche Rechtscholen' [Pendirian Sekolah Hukum Asli], *De Indische Gids* (1907) 1332-1333.

van Heutz, seorang ahli strategi militer dan administrator sipil mengenai kebijakan kolonial baru.³³

Penerapan Sebuah Kebijakan Kolonial di Sulawesi Tengah

‘Kewajiban moral’ Belanda di Sulawesi Tengah dimulai dengan serangkaian serangan militer terhadap negara-negara dan penduduk di daerah tersebut yang berpuncak pada ‘pasifikasi’ negara Mori pada tahun 1907. Pada tahun 1905, di wilayah Poso terjadi pendudukan yang relatif ‘lancar’ oleh pasukan Belanda (sebagian besar pasukan dari Sulawesi Utara dan Ambon) ke arah selatan dari pantai Teluk Tomini sebagai bagian dari serangan militer terkoordinasi melalui daratan Sulawesi. Di selatan, pasukan Belanda yang lebih besar ‘mengamankan’ kerajaan Gowa dan Luwu’. Versi Belanda tentang Pax Romana di mana Van Heutz, ‘penakluk Aceh’ adalah arsiteknya, meminta serangan militer skala besar sebelum fondasi struktur administrasi yang ditata ulang dapat diletakkan. ‘Keberkahan peradaban Belanda’ tidak pernah terwujud terhadap penduduk-penduduk di daerah-daerah luar Jawa yang sebelumnya tidak pernah dijajah tanpa campur tangan semacam itu. Di Sulawesi, seperti di tempat-tempat lain, ini berarti penaklukan negara-

³³ Van Deventer, penganjur kebijakan-kebijakan etis di parlemen Belanda menyatakan dalam sebuah artikel tahun 1902 '*Indie en de Democratie*' [Hindia dan Demokrasi] bahwa orang biasa tidak membutuhkan pendidikan (Barat). Pembela sosialis dari sebuah kebijakan kolonial yang pro kesejahteraan, Henry van Kol, berpendapat bahwa pendidikan apa pun yang diberikan kepada massa Indonesia harus praktis, sebuah argumen yang juga digunakan oleh para pendidik progresif di Eropa dan Australia sehubungan dengan kelas pekerja.

negara pribumi yang mampu mengorganisir perlawanan yang efektif dan lebih umum lagi, dan penghancuran sebanyak mungkin budaya tradisional, adat, yang akan menghambat pelaksanaan orde baru.³⁴ Sejauh sebuah kemiripan dengan ‘negara pribumi’ dipertahankan, penguasa mereka diwajibkan untuk menandatangani plakat yang dirancang untuk ‘melindungi kita [orang Belanda] untuk sebuah pengaruh yang sepenuhnya tidak terbatas.’

Militer dengan lancar menyapu wilayah Poso, di mana kegiatan misionaris harus ‘menyiapkan jalan’, perlu segera diikuti dengan serangan kedua, ketika sebagai jawaban terhadap pengumuman panglima militer wilayah itu bahwa warga jajahan baru sekarang bertanggung jawab untuk *herendiensten* (kerja wajib) dan pembayaran pajak (pajak tahunan per rumah tangga sebesar dua setengah gulden harus dibayar tunai), sebagian besar wilayah memberontak. Kedamaian pada akhirnya tercipta, tetapi dengan mengorbankan tiga puluh delapan nyawa pribumi dan lima puluh orang terluka.

Pekerjaan mendesak yang dilakukan pemerintahan kolonial di Sulawesi Tengah adalah

³⁴ Sikap ini diungkapkan oleh etnolog amatir dan misionaris Albert Kruyt dalam sebuah artikel berpengaruh berjudul 'The Influence of Western Civilization on the Inhabitants of Poso' dalam: BJ Schrieke ed., *The Effect of Western Influence on Native Civilization in the Malay Archipelago* (Batavia 1929). Kruyt adalah seorang penasihat dan peserta dalam proses penaklukan dan kemudian penjajahan meskipun dengan perubahan arah kebijakan setelah 1915 dia sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah terhadap misi Kristen. Dia diberi gelar kehormatan untuk karya etnografinya sebagai pengakuan atas tulisan-tulisannya yang banyak tentang masyarakat dan budaya di wilayah ini. Untuk sebuah bibliografi lengkap lihat J. Cote, '*The Colonization and Schooling of the To Pamona*'.

pembentukan pemerintahan pribumi dan pengembangan basis ekonomi yang layak. Administrasi pribumi yang sesuai merupakan sebuah prasyarat untuk melegalkan dan memfasilitasi penyebaran perintah-perintah kolonial ke tingkat desa. Proses-proses pengambilan keputusan kekeluargaan dan desa tradisional tidak didefinisikan secara jelas, dalam masyarakat yang pada dasarnya non-hierarkis untuk tujuan ini. Lebih jauh, ketidakpraktisan untuk mengakui keberadaan hukum dari lima belas wilayah suku yang terpisah memaksa pemerintah untuk merasionalisasi keadaan, dalam hal kepadatan penduduk, dengan pembentukan dua 'negara.' Sebuah hirarki pribumi diformalkan yang terdiri dari kepala-kepala distrik (*mokole bangke*) dan kepala-kepala desa (*mokole lipu*). Yang pertama menjadi penguasa-penguasa otonom nominal sedangkan yang terakhir menjadi corong desa dari perintah-perintah kolonial. Dengan cara ini, kehadiran 'kontrol pribumi atas urusan-urusan pribumi' dipertahankan. Uraian mengenai rincian peraturan-peraturan Eropa memastikan bahwa kekuasaan secara efektif dipertahankan di tangan-tangan orang Eropa secara paternalistik. Gagasan naif secara politis tentang sebuah federasi ber-pemerintahan sendiri yang dikemukakan oleh Engelenberg tidak dan tidak dapat ditoleransi dalam sebuah konteks kolonial, namun retorika otonomi yang mendasari misi moral terus berlanjut.³⁵

Dengan perdamaian dan otoritas ditegakkan pada tahun 1906, serangkaian dekrit, yang diterjemahkan dan dikomunikasikan oleh para misionaris, memerintahkan relokasi dan

³⁵ Bukti diskusi H. Colijn dalam bukunya 'Nota van de Regeering van het Bestuur enz. in de Afdeeling Midden Celebes', 22 April 1906 [Komentar-komentar tentang administrasi pemerintahan provinsi Sulawesi Tengah], Arsip Kruyt.

penyatuan desa-desa, penghapusan perbudakan, perburuan kepala dan pengadilan penyihir, dan praktik budidaya padi sawah. Misionaris Albert Kruyt, yang bertindak sebagai penasihat pemerintahan lokal, memberikan prakarsa tentang arahan maupun alasan kebijakan. Dengan istilah yang mudah dipahami oleh pemerintah kolonial, Kruyt menguraikan kondisi-kondisi masyarakat pribumi yang menghambat kemajuan ekonomi. Kunci dari kurangnya pembangunan di wilayah tersebut adalah jumlah penduduk yang rendah. Ini merupakan akibat dari perbudakan yang membuat kengangan untuk melahirkan anak dan angka kematian anak antara dua puluh dua persen dan lima puluh tujuh persen karena 'ketiadaan tanggung jawab dan ketidaktahuan' para orang tua, ditambah dengan ciri-ciri arsitektur tradisional dan kehidupan keluarga. Lebih jauh, metode-metode pertanian tradisional mempraktikkan penggunaan tempat-tempat tinggal sementara di ladang-ladang yang tidak cocok untuk membesarkan anak dan intensitas tenaga kerja dalam metode-metode pertanian tersebut memperburuk kesulitan dalam melahirkan anak.³⁶

Pada saat yang sama, ekspedisi-ekspedisi perburuan kepala dan pengumpulan hasil-hasil hutan yang lama untuk ditukar dengan barang-barang dekoratif di wilayah pesisir, mempengaruhi stamina laki-laki dan menambah ketidakamanan perkawinan dan keengganan perempuan untuk meanggung beban memiliki

³⁶ Pandangan Kruyt direproduksi secara rinci dalam 'Gegevens voor het Bevolkingsvraagstuk van een Gedeelte van Midden Celebes' [Bukti Berkaitan dengan Pertanyaan Populasi di Bagian Tengah Celebes], *Tijdschrift voor Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap* 20 (1903) 190-205. Terbukti bahwa publikasi di sebuah jurnal akademis terkemuka ini dirancang untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah di daerah tersebut.

lebih banyak anak. Impotensi, sebagai sebuah akibat dari ‘aktivitas seksual yang tidak terkendali’ dan tidak adanya pantangan pada hubungan sebelum dan di luar nikah, ikut berkontribusi terhadap penurunan dalam pertumbuhan populasi menurut etnolog amatir dan misionaris tersebut. Kelangkaan penduduk yang menyebabkan kelebihan pasokan tanah pada gilirannya membuat orang Pamona kehilangan stimulus untuk memperbaiki metode pertanian mereka. Praktik keagamaan seperti upacara pemakaman untuk menghormati orang yang meninggal dan sifat komunalistik masyarakat mencegah perkembangan kehidupan komersial pribumi, karena (selain untuk acara-acara seremonial) tidak ada dorongan untuk akumulasi modal.

Kebijakan pemerintah kolonial yang diberlakukan atas dasar penilaian tentang masyarakat dan ekonomi tradisional seperti itu, telah menghancurkan manifestasi-manifestasi eksternal budaya tradisional Pamona dalam kurun waktu satu dekade.³⁷ Kepunahan hampir seluruh kehidupan budaya formal To Pamona dicapai melalui larangan perburuan kepala, larangan acara-acara seremonial, dan penerapan pajak, yang kesemuanya tidak mengundang protes di kalangan pemilih Belanda. Upacara-upacara pemakaman, puncak kehidupan budaya Pamona, dilaksanakan setelah panen tahunan tanaman-tanaman ladang seperti jagung dan ubi kayu. Ini merupakan masa ketika larangan dalam mendongeng, pembacaan puisi, lelucon-lelucon dan teka-teki dicabut karena kegiatan-kegiatan yang menggunakan kemagisan kata tidak lagi dapat menyinggung roh-roh sehing-

ga memastikan keberhasilan panen. Pada periode-periode ini warisan yang kaya dari tradisi lisan Pamona disuarakan sepenuhnya. Momen tersebut pria dan wanita muda diperkenalkan ke dalam kehidupan masyarakat dewasa dan pasangan-pasangan dipilihkan.

Menurut Belanda, ini adalah sebuah masa ketika ‘orang Toraja tidak sibuk melakukan apapun’ dan ketika begitu banyak hasil panen dan kekayaan yang terkumpul dalam bentuk kerbau dan hiasan telah ‘disia-siakan.’ Dengan diberlakukannya pajak, periode tenang dalam siklus pertanian ini harus digunakan untuk mengumpulkan atau memproduksi barang untuk dijual guna mengumpulkan uang tunai demi membayar pajak per keluarga. Seorang misionaris menyatakan dalam laporannya kepada jemaat gereja di Belanda yang mendukungnya:

Banyak wajib pajak akan tersenyum ketika saya menyatakan bahwa pembayaran pajak berlangsung dengan sangat baik. Dulu orang Toraja tidak melakukan apa-apa selama beberapa bulan setelah panen [...] Sekarang setelah panen banyak orang pergi ke hutan untuk memotong rotan untuk dijual di daerah pantai. Banyak yang membersihkan rumput perkebunan kelapa milik penduduk-penduduk pesisir [untuk mendapatkan uang]. Dengan cara ini orang Toraja dapat hidup; mereka membayar pajak dan kemudian memiliki sisa uang untuk membeli jaket atau celana panjang.³⁸

³⁷ Menurut W. Kaudern, seorang etnolog Swedia yang mengunjungi daerah itu satu dekade kemudian. [*Ethnological Studies in Celebes: Results of the Author's Expedition to Celebes, 1917-1920 I \(Gotenborg 1925\)*](#) 31-53.

³⁸ Ph.H.C. Hofman, ‘De Zending in Poso Gedurende 1906’ [Misi Bekerja di Poso untuk Tahun 1906], *Mededelingen vanwege het Nederlandsch Zendingengenootschap* 51 (1907) 345.

Selain itu, dengan pelarangan ekspedisi-ekspedisi untuk pengambilan kulit kepala seremonial (dasar dari apa yang disebut perburuan kepala), dan pembatasan ketat terhadap kerumitan dan pengeluaran untuk upacara-upacara pemakaman dan pembatasan periode perayaan pasca panen tradisional dengan pengenalan penanaman sawah, periode tersebut sudah kehilangan makna simbolisnya.

Desa-desanya baru yang dibentuk pemerintah kolonial akan ditempatkan di sepanjang rute jalan baru untuk memfasilitasi pasokan tenaga kerja untuk pembangunan jalan dan mengontrol penduduk secara lebih efektif. Pemerintah lebih menyukai pembentukan desa-desa besar sebagai unit-unit ekonomi yang lebih layak yang pada akhirnya akan meraup keuntungan dari keberadaan jalan-jalan untuk mengangkut hasil bumi yang dapat dipasarkan. Akhirnya, kerja paksa di jalan-jalan dan pembangunan desa-desa baru dengan pengenalan keterampilan-ketrampilan membangun yang berbeda dan kesadaran akan kebersihan Eropa dan cita-cita seperti 'disiplin kerja keras,' dipandang sebagai pendidikan dalam diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, pemerintah kolonial berupaya membangun sebuah basis ekonomi baru bagi perekonomian Sulawesi Tengah. Penciptaan jaringan jalan raya dapat merangsang perdagangan. Pembentukan desa-desa besar, selain lebih efisien untuk dikelola, juga menghasilkan efisiensi produksi yang lebih besar karena ketersediaan tenaga kerja yang besar dan pembentukan lebih banyak konsumen. Subsidi-subsidi sekolah (dibayarkan ke sekolah misionaris) dapat digunakan secara lebih efektif di pusat populasi yang lebih besar. Tempat-tempat tinggal individu keluarga tidak hanya menyederhanakan tugas pencacahan dan pemungutan pajak, tetapi juga kondusif untuk kondisi kehidupan keluarga

yang lebih higienis dan lebih sesuai secara moral. Hal ini pada gilirannya dapat merangsang pembentukan keluarga-keluarga besar dan mendorong konsep kepemilikan pribadi. Secara umum, Belanda secara implisit meyakini bahwa dengan mengatur kehidupan desa Pamona dapat merangsang pertumbuhan ekonomi sekaligus menyingkirkan apa yang dianggap sebagai pengaruh-pengaruh negatif dari budaya tradisional.

Program pemukiman kembali diiringi dengan inovasi besar lainnya, yaitu pengenalan budidaya padi sawah. Pengetahuan tentang budidaya sawah hanya terbatas di wilayah ini, dan secara tradisional hanya dilakukan oleh orang-orang pegunungan di barat laut dan Toraja di Sulawesi Selatan. Budidaya sawah dianggap oleh pemerintah kolonial sebagai sebuah metode pertanian yang lebih produktif daripada budidaya padi ladang dalam hal penggunaan tenaga kerja dan sumber daya lahan yang efisien dan potensi surplus produksi yang lebih besar. Selain itu, keadaan baru di desa-desa besar dengan kewajiban yang bersamaan untuk memelihara tatanan dengan baik, kebutuhan akan persediaan tenaga kerja wajib yang teratur dan kehadiran anak-anak di sekolah menuntut keberadaan yang dekat satu sama lain dengan desa yang diperluas dengan sebuah wilayah produksi makanan yang efisien dan menetap. Kehidupan berpindah-pindah yang melekat pada budidaya penanaman padi ladang tidak bisa disamakan dengan gaya hidup desa permanen yang baru. Teknik-teknik bertani juga membentuk sebuah 'sumber pasokan tentang percontohan praktis dan aktual dari prinsip-prinsip tertentu' dan menjadi dasar dampak kependidikan dari penjajahan di wilayah itu. Ini memaksakan gaya hidup menetap, yang diyakini akan meningkatkan efisiensi ekonomi. Hal ini membiasakan orang

dengan sebuah disiplin dan keteraturan, tidak seperti di padi ladang, yang menurut misionaris mendorong karakteristik ‘melakukan apa saja sesuka mereka kapan pun mereka anggap cocok.’ Sesungguhnya, ‘sekolah adalah untuk kaum muda, sawah untuk orang dewasa.’³⁹ Budidaya sawah mendorong pembentukan sikap-sikap yang diinginkan serta memberikan pendidikan dalam matematika terapan dan aritmatika mental. Pengetahuan yang telah diperoleh dari pembangunan sawah telah mengajari penduduk-penduduk desa bagaimana menghitung luas jalan yang menjadi tanggung jawab setiap orang selama masa *herendiensten*. Penanaman jangka waktu panjang di sebuah petak tertentu, yang tidak mungkin dilakukan dalam metode-metode pertanian tradisional, membantu untuk mengembangkan gagasan tentang kepemilikan pribadi.

Mungkin yang lebih penting daripada rangsangan terhadap perilaku rasional ini adalah dampak metode-metode pertanian baru terhadap keyakinan agama. Semua ritual yang secara tradisional terkait dengan penanaman makanan pokok yang memberi kehidupan harus ditinggalkan berdasarkan model pertanian baru. Penerapannya dilihat oleh orang Pamona sebagai sebuah serangan terhadap cara penghidupan dan kebudayaan mereka. Metode-metode baru tersebut menolak perintah dari roh-roh padi, dan tradisi nenek moyang. Sebagai gantinya, orang-orang Eropa berusaha memperkenalkan keunggulan budayanya, individualisme, dan keserakahan mereka sendiri. Pengenalan padi sawah hanya

menjadi mungkin karena kehadiran kekuatan militer dan rayuan-rayuan misionaris. Bahkan lebih dari peraturan-peraturan tentang kerja paksa, hal tersebut menimbulkan penghinaan, hukuman dan pemberhentian kepala-kepala desa yang tanggung jawabnya sekarang adalah untuk memastikan bahwa para rekan mereka sebelumnya sepenuhnya mengikuti peraturan-peraturan persawahan. Menurut buku harian calon controleur Gobe, diperlukan konsentrasi para pejabat Belanda dan pribumi yang ditunjuk Belanda (biasanya dari daerah Minahasa di Sulawesi Utara) untuk memaksakan reformasi tersebut kepada orang Pamona yang menentang. Gobe yang junior dan tidak berpengalaman, yang kemudian menjadi penasihat kolonial untuk urusan-urusan pribumi, ditegur karena kepekaannya ketika dia mengungkapkan keraguannya mengenai metode-metode yang diminta untuk diterapkan dalam melaksanakan program tersebut. Jelas bagi administrator-administrator yang lebih berpengalaman bahwa tidak ada ruang dalam tugas tersebut bagi simpati palsu. Engelenberg sendiri dikritik keras karena ‘mengibarkan bendera etis’ oleh H. Colijn, pemecah masalah Gubernur Jenderal dan komisioner untuk desentralisasi di luar Jawa. Colijn, yang kemudian menjadi menteri koloni dan kritikus utama kebijakan ‘etika’ bersama dengan bawahan Engelenberg, Mazee, menggambarkan pandangan-pandangan superiorinya dengan meremehkan ‘etis’ dan ‘kepentingan diri sendiri.’⁴⁰

Ilusi tentang pemerintahan otonom terhubung dengan kenyataan tentang pembiayaan

³⁹ Pembahasan tentang konsekuensi-konsekuensi dari pengenalan budidaya sawah ini didasarkan pada bacaan kritis artikel Kruyt ‘De Betekenis van de Natte Rijstbouw voor de Possoers’ [Arti Penting Budidaya Padi Basah Bagi Masyarakat Poso], *Koloniale Studien* 8 (1924) 31-53.

⁴⁰ Komentar Colijn ada dalam ‘Nota van de Regeerings Commissaris voor Decentralisatie,’ 12 September 1907 [Memorandum oleh Komisioner Desentralisasi]. Administrator lokal mengungkapkan sambutannya langsung kepada misionaris Kruyt dalam catatan tak bertanggal tahun 1908.

mandiri. Kelangsungan hidup aparat kolonial yang diperluas bergantung pada kemandirian keuangan masing-masing daerah yang pada gilirannya memerlukan pelatihan penduduk-penduduk pribumi tentang keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk mengembangkan sumber daya keuangan dan intelektual yang dibutuhkan. Diperlukan rasa tanggung jawab individu dan inisiatif yang menurut administrator lokal, Mazee, belum dimiliki oleh masyarakat. Dalam pandangan Colijn, ini karena fakta bahwa negeri itu 'sangat terbelakang dalam perkembangan politiknya.'⁴¹ Akibatnya, mitos tentang pemerintahan sendiri menjadi pendorong untuk memastikan sebuah komitmen finansial dan psikologis yang besar bagi kolonisasi.

Dalam sebuah laporan kepada Gubernur Jenderal tentang usulan untuk mengatur hubungan keuangan antara apa yang disebut negara otonom yang diwakili oleh asisten residen dan bendahara kolonial, Colijn menguraikan prinsip-prinsip keuangan yang menjadi dasar kebijakan kolonial yang baru.⁴² Masalah bagi Colijn adalah untuk menyeimbangkan dengan baik kebutuhan-kebutuhan perbendaharaan kolonial untuk restitusi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial di Sulawesi Tengah dan kebutuhannya untuk daerah ini menyumbang ke kas publik di satu sisi, dengan kebutuhan keuangan daerah tersebut sendiri di sisi lain. Signifikansi laporan ini terletak pada kenyataan bahwa

laporan tersebut mendefinisikan basis jangka panjang kolonialisme Belanda sebagai ketergantungan pada pajak terhadap produktivitas penduduk pribumi yang lebih besar. Prinsip ini menjadi pokok kebijakan ekspansionis kolonial yang baru. Dengan memasukkan pulau-pulau luar Jawa, yang sebagian besar belum dieksplorasi atau belum dieksploitasi, diharapkan sebuah basis ekonomi yang lebih luas akan disediakan untuk administrasi otoritas kolonial, yang, pada saat yang sama, akan mengurangi sebagian tekanan di Jawa, objek perhatian publik Belanda yang berkembang di Belanda, dan memungkinkan beberapa kontribusi untuk infrastruktur ekonominya. Jawa, bahkan saat itu, adalah pulau dengan populasi terbesar, tetapi yang lebih penting, budayanya yang paling menarik perhatian ilmiah dan paling banyak diketahui.

Beralih secara khusus ke Sulawesi Tengah, Colijn menimbang luasnya, setengah dari Jawa, yang membuatnya berpotensi layak secara ekonomi dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip keuangannya yang luas. Kurangnya populasi yang padat perlu diimbangi dengan wilayah geografis yang lebih luas untuk menjamin populasi besar pembayar pajak yang memuaskan. Ekonomi administrasi juga menyarankan pengurangan jumlah personel senior Eropa dan ketergantungan yang lebih besar pada pejabat-pejabat pribumi yang dibayar rendah dan pejabat-pejabat Eropa eselon rendah yang bekerja di lapangan, seperti yang disarankan Cohen-Stuart. Desentralisasi harus lebih bersandar secara ekonomi, daripada pemerintahan kolonial langsung seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, pengawasan Eropa yang lebih ketat tetap penting untuk memastikan kelangsungan finansial. Colijn secara provokatif merujuk Aceh sebagai sebuah contoh di mana, tidak ada pengeluaran militer yang didanai secara

⁴¹ H. Colijn, 'De Organisatie van het Bestuur enz. di de Afdeeling Midden Celebes', 23 April 1906, Arsip Kruyt.

⁴² Ini adalah sifat dari memorandum 1906. Memorandum 1907 (lihat catatan 40) ditujukan untuk lebih menyempurnakan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam kertas kerja 1906. Detail-detail dan prinsip-prinsip dari kedua dokumen ini dibahas di bagian selanjutnya dari makalah ini.

terpusat, sebuah surplus lokal lebih dari setengah juta gulden telah dicatat dan di mana, dengan perpanjangan lebih lanjut sebuah rezim perpajakan, surplus satu juta gulden dapat diharapkan terpenuhi di masa depan secara cepat. Masalahnya adalah untuk memastikan bahwa ‘perluasan otoritas kami tidak mengakibatkan kemunduran kekuatan finansial kami.’

Dengan asumsi legalisme tentang sebuah negara pribumi otonom yang diciptakan oleh militer Belanda pada tahun 1906, sebuah prinsip akuntansi keuangan sekarang dapat digunakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diuraikannya. Berdasarkan plakat yang telah ditandatangani oleh para penguasa tersebut, pemerintah kolonial menyatakan bahwa ‘penguasa otonom telah memberi kami hak, antara lain, untuk mengatur keuangan negaranya demi kepentingannya dan kepentingan kami.’ Atas dasar itu, layanan-layanan yang secara inheren menjadi tanggung jawab pemerintah kolonial, seperti penyediaan personel Eropa untuk administrasi, perpajakan dan pos dan telegraf, akan dibiayai oleh perbendaharaan kolonial. Pelayanan-pelayanan lain, termasuk penyelenggaraan pemerintahan pribumi, semua biaya dan pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan materiil penduduk dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan, menjadi tanggung jawab pemerintahan otonom melalui kas daerah yang dikendalikan asisten residen (Eropa). Bahkan, kas daerah kemudian diminta untuk memberikan kompensasi penuh kepada pemerintah pusat atas pengeluaran yang telah dikeluarkannya di daerah. Selain itu, wilayah tersebut harus memberikan sumbangan kepada biaya administrasi umum koloni secara keseluruhan. Atas dasar itu, dengan pajak tahunan kepala keluarga yang diperkirakan mencapai lima persen dari

pendapatan, daerah tersebut pada tahun 1907 akan mengumpulkan 250.000 gulden yang setengahnya akan diterima oleh pemerintah pusat. Meskipun tidak akan memungkinkan daerah untuk memberikan sebuah kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan umum, ia percaya, hal tersebut akan mengembalikan pengeluaran pemerintah pusat di daerah dan keadaan tersebut akan menjadi sebuah perbaikan nyata pada defisit 60.000 gulden pada tahun sebelumnya karena ketidakefisienan dan ketidakcukupan administrasi pada saat itu, dengan kata lain, administrasi Engelenberg.

Colijn memperkirakan sebuah pengeluaran tahunan tetap sekitar 67.000 gulden untuk pembayaran administrasi pribumi dan penyediaan layanan-layanan pendidikan dan kesehatan. Dia sangat tajam ketika mengomentari pendidikan yang dia yakini seharusnya tidak melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat. Seperti banyak orang semasanya, Colijn percaya bahwa terlalu banyak pendidikan akan mengarah pada penciptaan sebuah kelas ‘para pemburu posisi’ yang akan mengacaukan masyarakat dan ekonomi pada umumnya. Pembiayaan pendidikan lokal, dia tegaskan, adalah ‘satu-satunya jaminan untuk mengakhiri secara permanen pengeluaran pendidikan besar yang membebani yang terjadi di Minahassa [wilayah yang sebagian besar Kristen di Sulawesi Utara].’ Dua puluh sekolah harus dialokasikan 500 gulden untuk setiap sekolah dengan setiap sekolah per 12.500 penduduk, ‘sebuah rasio yang bisa diterima jika kita mengingat rasio rata-rata untuk keseluruhan Hindia.’ Dengan mengurangi biaya administrasi dasar dan layanan-layanan kesejahteraan dari perkiraan pendapatan daerah sebesar 250.000 gulden yang berasal dari pajak umum ditambah dengan pendapatan sebesar 42.000

dari ekspor dan pajak atas perdagangan, dan pengurangan kontribusi sebesar 150.000 gulden untuk Batavia, Colijn memperkirakan bahwa daerah (yaitu negara-negara otonom) akan memiliki 75.000 gulden untuk pengeluaran program-program lain. Angka ini dia yakini agak tinggi tetapi menjustificasinya dengan alasan bahwa suatu jaringan komunikasi yang lengkap belum dibangun di wilayah tersebut.

Prinsip-prinsip yang diucapkan Colijn berdampak membatasi semua pengeluaran pemerintah hanya pada kemampuan keuangan masing-masing daerah sehingga keseluruhan program 'etis' dapat dibiayai secara mandiri. Dokumen tersebut menyolidkan etos administratif yang mendasari kebijakan ekspansionis kolonial awal abad ke-20. Ini juga merupakan prinsip yang diterapkan Van Heutz, misalnya, untuk mendanai sekolah-sekolah desa di Jawa. Klaim ini dianggap 'etis' dalam prinsip-prinsipnya: menunjukkan kepedulian tidak hanya dengan keharusan-keharusan tentang layanan-layanan utama untuk kesejahteraan materi, administrasi yang baik, pendidikan dan kesehatan, tetapi juga dalam mengembangkan lingkungan yang dirancang untuk melatih penduduk pribumi untuk menerima tanggung jawab keanggotaannya di koloni Hindia Belanda dan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk demi kepentingan terbaik daerah dan negara. Kolonialisme harus didanai oleh penduduk yang menjadi sasaran penjajahan dan, terlebih lagi, semua pengorbanan warga terjajah tidak hanya dilihat sebagai keuntungan secara materi, tetapi juga secara kependidikan menguntungkan mereka.

Kesimpulan

Dalam studi kasus kebijakan kolonial baru ini, terlihat bahwa apa yang pada awalnya merupakan ungkapan-ungkapan idealis tentang semangat kemanusiaan yang barasal dari sebuah kepercayaan dan sebuah moral dan keunggulan budaya, dengan cepat tenggelam dalam prinsip-prinsip efisiensi administrasi dan keuntungan finansial. Jika, seperti yang ditunjukkan banyak orang, retorika otonomi diubah menjadi tuntutan-tuntutan kemerdekaan dari sebuah generasi nasionalis Indonesia yang dibesarkan dalam sistem pendidikan yang berasal dari masa tersebut, ini tidak ada hubungannya dengan keinginan-keinginan para administrator kolonial atau dengan para intelektual Belanda yang menguraikan pandangan 'etis' tersebut. Hal mendasar baik retorika para orientalis maupun kebijakan para praktisi kolonial adalah ekspresi nasionalisme Belanda yang didasarkan pada kepercayaan pada superioritas moral (dan kemudian rasial) dari formasi politik, ekonomi dan budaya Eropa. Sebagai tanggapan atas pernyataan klaim-klaim nasionalis semacam itu, orang-orang Indonesia, dengan sebuah kesadaran modern, mengklaim otonomi dan emansipasi mereka sendiri. Pada saat yang sama, seperti yang ditunjukkan oleh penulis pasca-kolonialis seperti Partha Chatterjee, terdapat sebuah interaksi dan transfusi yang signifikan antara negara kolonial dan pasca-kolonial dan arsitek-arsiteknya.⁴³ Itu adalah negara kolonial modern yang dibentuk oleh Hendrikus Colijn dengan mengorbankan Visi A.J.M. Engelen-

⁴³ P. Chatterjee, *Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse* (1986). Di sini Chatterjee tertarik untuk menunjukkan sifat turunan dari wacana nasionalis India dan argumennya dapat diterapkan pada gerakan nasionalis Indonesia.

berg tentang sebuah federasi negara-negara otonom, yang menjadi parameter-parameter dari aspirasi-aspirasi nasionalis dan batas-batas negara merdeka Indonesia. Dan, seperti yang dikemukakan Robert Cribb, kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan secara terpusatlah yang membuat negara kolonial modern begitu penting bagi kapitalisme internasional sebelum perang, yang mengatur kebijakan pemerintah Indonesia selama tiga dekade terakhir.